

Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Pemenuhan Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Jakarta

4

Nurmala Ahmar
Maulana Salya Kurniawan
STIE Perbanas Surabaya

Abstract

The objective of this research is to find empirical evidence about differences of profitability before and after good corporate governance (independence commissioner, audit committee, and corporate secretary) as KEP-399/BEJ/07-2001 yaitu Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Huruf C.1 declared in Bursa Efek Jakarta.

Claessens, Djankov, dan Pohl (1996); Patibandia (2001); Gompers, Ishii, and Metrick (2003) found that corporate performance much better after good corporate governance in that profitability. From 155 manufactured companies in Bursa Efek Jakarta, there're 13 companies that had good corporate governance as KEP-399/BEJ/07-2001. With paired t-test, this research found that profitability (gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, dan return on assets) decline after GCG and only return on equity had better.

Keywords : *good corporate governance, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on assets, return on equiyt, independence commissioner, audit committee, and corporate secretary*

1. PENDAHULUAN

Sejak krisis keuangan melanda Asia pertengahan tahun 1997, Indonesia merupakan negara yang mengalami krisis paling parah dan paling lama dalam proses pemulihannya. Kurs rupiah terhadap dollar jatuh sampai mencapai Rp.16.000, pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 1998, kredit macet menggunung mencapai 70% kredit sektor perbankan dalam negeri, suku bunga simpanan melonjak sampai ke angka 65% pertahun, sektor riil berhenti beroperasi dan pengangguran terbuka melonjak drastis (Ardiansyah, 2004)

Penyebab dari krisis ekonomi tidak hanya terletak pada fundamental ekonomi yang lemah saja tetapi juga karena hutang swasta luar negeri yang mencapai jumlah yang cukup besar. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah, akibat adanya peningkatan dollar AS dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah yang cukup besar dan secara bersamaan, sehingga mengakibatkan permintaan akan dollar meningkat. Untuk mencegah semakin parahnya krisis yang melanda Indonesia, maka kreditor negara seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank

Dunia (*World Bank*), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sebagai bagian dari pinjaman atau hibah yang telah menekankan agar *policy direction* pemerintah diarahkan untuk mensosialisasikan pelaksanaan praktik *good corporate governance*.

Indonesia mulai menyadari pentingnya penerapan *good corporate governance* pada tahun 1999 dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Komite Nasional on Corporate Governance pada tanggal 19 Agustus 1999 melalui Surat Keputusan Menko Ekuin Nomor: Kep. 10/M.EKUI/08/1999 yang menghasilkan kerangka kerja yang disebut kode *Good Corporate Governance* REV 3.1, berisi tentang rekomendasi penting yang berfungsi sebagai kerangka badan reguler dan asosiasi-asosiasi industri untuk mengembangkan kode sektoral lebih rinci.

Usaha penerapan *good corporate governance* juga akhirnya direspon oleh Bursa Efek Jakarta dengan mengeluarkan surat keputusan: Kep-399/BEJ/07-2001 yang isinya mewajibkan perusahaan tercatat wajib memiliki komisar independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan, dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat tingkat kesehatan perusahaan menjadi lebih baik.

Terciptanya *good corporate governance*, yang dicerminkan dengan keberadaan komisar independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi nilai yang maksimal dari segi financial terhadap anggaran negara dan nilai tambah yang kompetitif bagi perusahaan dan *stakeholders*-nya. Dengan demikian tingkat kesehatan perusahaan menjadi meningkat yang terwujud adanya efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan menjadi bertambah.

Tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisa laporan keuangan melalui rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Idealnya dengan adanya penerapan *good corporate governance* yang menekankan *transparency, accountability, fairness, dan responsibility* perusahaan diharapkan mampu menghasilkan suatu mutu yang memberikan dampak positif terutama pada peningkatan profitabilitas yang diperoleh.

Penelitian tentang pengaruh pemenuhan *good corporate governance* terhadap kinerja pernah dilakukan oleh Claessens, Djankov, dan Pohl (1996); Patibandia (2001); Gompers, Ishii, dan Metrick (2003)

Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris apakah profitabilitas perusahaan sesudah pemenuhan *good corporate governance* lebih baik dibandingkan dengan profitabilitas perusahaan sebelum pemenuhan *good corporate governance*.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Good Corporate Governance

Krisis ekonomi di Asia yang dimulai pada tahun 1997 telah menyadarkan banyak kalangan tentang pentingnya *good corporate governance*. Betapa tidak, "Macan Asia" yang diramalkan itu ternyata penuh borok karena praktek-praktek tidak sehat oleh sebagian besar anggota bisnis di negara-negara seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pengurus bisnis tidak berlaku jujur, pemilik hanya mencari untung jangka pendek, pengawas tumpul dan tidak berfungsi, para manajer memillih sikap oportunistis, kaum profesional menjadi sekedar cap atau stempel, aparat pemerintah ikut bermain, dan masyarakat hanya bisa apatis saja. Tidak mustahil jika hantaman krisis tersebut berbanding lurus dengan tingkat kualitas *corporate governance* di masing-masing negara, bahkan masing-masing entitas usaha.

Untuk memulihkan keadaan ini dan guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif, pimpinan puncak Bank Dunia, *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), dan asosiasi-asosiasi bisnis antar negara aktif melakukan gerakan perubahan ke arah *good corporate governance*. Dalam kaitan ini, pertemuan 40 para pelaku bisnis senior dari enam negara, yakni India, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada tanggal 12-14 September 1999 yang telah membicarakan mengenai pengembalian kepercayaan investor internasional di kawasan ini dan mencegah berulangnya krisis ekonomi di Asia melalui promosi *good corporate governance*.

Seperti halnya di Malaysia, Thailand dan Filipina, pihak Indonesia ikut mengambil inisiatif dalam upaya besar ini. Pada bulan Agustus 1999, Menteri Negara Koordinator bidang Ekuin membentuk Komisi Nasional melalui Surat Keputusan Menko Ekuin nomor:10/M.EKUIV/08/1999 yang ditugaskan untuk menformulasikan dan merekomendasikan kebijakan nasional bagi perwujudan *good corporate governance*

Harus diakui bahwa konsep *corporate governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi para pengusaha sekalipun, sehingga tidak mengherankan bila hingga kini tidak ada padanan bahasa Indonesia yang tepat untuk istilah tersebut. Orang cenderung mengungkapkan elemen-elemen pokok dari *corporate governance* untuk menjelaskan konsep tersebut. Menurut Aburizal Bakrie (2000 : 23-24), ada empat elemen pokok dalam konsep, *corporate governance*, yaitu :

1. *Transparency*
Perusahaan berkewajiban menyediakan informasi obyektif, akurat dan tepat waktu kepada *shareholder*.
2. *Accountability*
Mensyaratkan adanya sistem kondusif bagi pengawasan efektif dalam kinerja sebuah perusahaan, yang tercermin pada pembagian wewenang yang jelas antara unsur-unsur pokok sebuah perusahaan.
3. *Fairness*
Perusahaan berkewajiban untuk menciptakan kejelasan hak-hak pemegang saham, sistem hukum dan penegakan perturan yang mengayomi para pemodal, terutama hak pemegang saham minoritas.
4. *Responsibility*
Perusahaan tidak hanya wajib mematuhi undang-undang atau ketentuan yang berlaku tetapi juga membawa beban etis untuk kemaslahatan lingkungan, masyarakat di sekitarnya.

Dari penguraian singkat mengenai elemen-elemen pokok diatas *corporate governance* dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan dan praktek yang memberikan pagar lebih jelas dari proses interaksi berbagai wewenang dan fungsi-fungsi internal dari sebuah perusahaan.

Corporate governance merupakan proses struktur pengelolaan bisnis dan urusan-urusan perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kemakmuran korporasi dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham yang optimal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *shareholders* yang lain. I Ketut Mardjana (2000:30). Konsep *corporate governance* secara jelas juga mengaitkan hubungan tanggung jawab moral dan etis kinerja sebuah perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam usahanya mendukung penerapan *corporate governance* di Indonesia, maka Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengeluarkan keputusan nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 yaitu Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Huruf C.1 mengenai kewajiban perusahaan tercatat memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan

1) Komisaris Independen

Berdasarkan keputusan Direksi BEJ nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 yaitu Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Komposisi komisaris haruslah sedemikian rupa, sekurang-kurangnya 30% anggota komisaris haruslah orang luar untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan oleh komisaris.

2) Komite Audit

Berdasarkan keputusan Direksi BEJ nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Huruf C, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

3) Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan keputusan Direksi BEJ nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 Huruf C fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan

perusahaan tercatat tersebut dan mengusai peraturan perundangan di bidang Pasar Modal khususnya berkaitan dengan masalah keterbukaan.

Sekretaris perusahaan selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, juga wajib menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan tercatat.
 - b. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih.
 - c. Menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil rapat.
 - d. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Penunjukan sekretaris perusahaan wajib dilaporkan ke bursa selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah penunjukan dan diiklankan sekurang-kurangnya satu surat kabar harian yang berperedaran nasional.

2.2. Profitabilitas Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan

Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan keputusan, dimana rasio ini digunakan sebagai alat pengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan keefektifan manajemen secara menyeluruh dan secara tidak langsung para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya, namun juga memperkuat kondisi keuangan perusahaan yang kuat. Rasio profitabilitas dapat dibedakan menjadi lima golongan :

1. *Gross Profit Margin*
Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
2. *Operating Profit Margin*
Rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum adanya pajak dan bunga dari penjualan yang dilakukan.
3. *Net Profit Margin*
Rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah dipotong adanya pajak dan bunga dari penjualan yang dilakukan.
4. *Return on Equity*
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba tersedia bagi pemegang saham.
5. *Return on Assets*
Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan assetnya untuk menghasilkan laba dengan membandingkan laba pajak dengan total aktiva.

2.2. Hubungan Profitabilitas dengan Corporate Governance

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sudah menjadi kebutuhan global, saat ini hampir semua bursa di dunia mensyaratkan adanya pengungkapan mengenai kebijakan *good corporate governance* perusahaan dalam laporan keuangan perusahaan publik, termasuk didalamnya kompensasi komisaris dan direksi dan transaksi yang terkait dengan pihak terafiliasi.

Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan memperoleh banyak sekali manfaat, seperti: akses sumber dana yang murah ke lembaga keuangan internasional, kinerja saham semakin meningkat dan terus menjadi incaran investor, kontrol yang ketat dari kemungkinan mis-managemen dan efisiensi operasi yang memungkinkan untuk bersaing secara kompetitif di pasar global.

Tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang umumnya adalah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan memperluas perusahaan. Profitabilitas ini bisa diperoleh jika perusahaan mampu bertindak efisien dan efektif.

Tentunya dengan adanya konsep *corporate governance* yang diterapkan oleh setiap perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan adanya hal tersebut akan menyebabkan para *shareholder* akan semakin tertarik pada perusahaan yang telah memenuhi kriteria *good corporate governance*, karena semakin tingginya kualitas yang dihasilkan. Sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pangsa pasar dan harga yang menjurus pada peningkatan pendapatan yang dihasilkan, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murali (2001) dalam *Equity Pattern, Corporate Governance and Performance : A study of India's Corporate Sector*, menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki investor asing memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sebelumnya juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Claessens, Djankov, dan Pohl (1996) dalam *Ownership dan Corporate Governance : Evidence from Czech Republic*, juga memberikan kesimpulan yang sama, yaitu: perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terpusat, yaitu struktur kepemilikan dimana bank dan investor strategis sebagai penyandang dana, senantiasa ikut ambil bagian dalam pengawasan perusahaan sebagaimana prinsip *corporate governance*, terbukti secara empiris menghasilkan nilai pasar dan profitabilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Gompers, Ishii, dan Metrick (2003) mengenai *Corporate Governance And Equity Prices* juga menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki sistem pengawasan yang kuat terhadap perusahaannya mempunyai peningkatan nilai perusahaan, peningkatan profit, peningkatan pertumbuhan penjualan, pengurangan biaya dan sedikit akuisisi perusahaan.

Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peningkatan kinerja perusahaan



Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, pemerintah memberi rekomendasi agar perusahaan menggunakan prinsip *good corporate governance*, yang kemudian direspon oleh Bursa Efek Jakarta dengan mengeluarkan surat keputusan: Kep-399/BEJ/07-2001 yang isinya mewajibkan perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan, dimana hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat tingkat kesehatan perusahaan menjadi lebih baik.

Dengan adanya *good corporate governance* diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Peningkatan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat dilihat dan diukur dari menganalisa laporan keuangan melalui rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Dari kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : "Tingkat profitabilitas perusahaan sesudah pemenuhan *good corporate governance* lebih besar daripada tingkat profitabilitas perusahaan sebelum pemenuhan *good corporate governance*".

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi Dan Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan publik dalam bidang industri manufaktur go publik di Bursa Efek Jakarta, yang telah memenuhi kriteria *good corporate governance*. Kriteria pemenuhan *good corporate governance* pada penelitian ini dispesifikan pada pengangkatan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor : KEP-399/BEJ/07-2001 yaitu Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Huruf C.1. Sampel penelitian diambil secara *purposive-sampling*, dimana sampel harus memenuhi kriteria :

1. Perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Jakarta dimana pada tahun 2001 telah memenuhi ketentuan *good corporate governance* sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor :KEP-399/BEJ/07/2001 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A huruf C.1.
2. Kriteria pemenuhan *corporate governance* dispesifikasikan pada pengangkatan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan yang sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor :KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Huruf I-A huruf C.1.
3. Tersedia laporan keuangan untuk dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah pemenuhan kriteria *good corporate governance* yang sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Huruf I-A huruf C.1, dimana pemenuhan ketiga komponen *good corporate governance*, yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan pada tahun 1999, 2000, dan 2001.

3.2 Definisi Operasional Dan Identifikasi Variabel

Good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan akstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam penelitian ini komponen *good corporate governance* dispesifikasikan pada pengangkatan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan sesuai dengan KEP-399 /BEJ/ 07-2001 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Huruf C.

Definisi operasional dan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan presentase dari laba kotor (*sales – cost of good sold*) dibandingkan dengan *sales*. Dalam penelitian ini menggunakan rasio *gross profit margin* dihitung dengan rumus :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Sales} - \text{Cost of Goods Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Operating Profit Margin*

Rasio ini menggambarkan apa yang biasanya disebut "*pure profit*" yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. *Operating profit* disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran berupa pajak. Ukuran *operating profit margin* dalam penelitian ini dirumuskan :

$$\text{Operating Profit} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Sales}}$$

3. Net Profit Margin

Net profit margin adalah merupakan suatu rasio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan setelah dikurangi dengan seluruh *expenses* termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik profitabilitas suatu perusahaan (Syamsudin, 1985:55). Ukuran *net profit margin* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Profit after Taxes}}{\text{Sales}}$$

4. Return on equity (ROE)

Rasio ini mengukur kemampuan untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi *return on equity* perusahaan, maka semakin baik profitabilitas suatu perusahaan (Syamsudin, 1985:58). Ukuran *return on equity* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Profit after Taxes}}{\text{Stockholders Equity}}$$

5. Return on total assets (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin tinggi *return on assets* suatu perusahaan, maka semakin baik profitabilitas suatu perusahaan. Ukuran *return on assets* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net profit after Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

3.3. Metode Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan alat statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai komponen rasio profitabilitas (*gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan return on assets*) dalam penelitian ini, perbandingan rasio-rasio profitabilitas sebelum dan sesudah pemenuhan *good corporate governance*, serta peningkatan atau penurunan rasio profitabilitas antara perusahaan sebelum dan sesudah pemenuhan *good corporate governance*.

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan uji t beda dua rata-rata, dengan melakukan uji normalitas data sebelum pengujian hipotesis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berasal dari populasi sebesar sejumlah seratus lima puluh lima perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, terdapat tiga belas perusahaan yang telah memenuhi kriteria *good corporate governance* pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai rasio-rasio profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin baik kinerja suatu perusahaan, dan sebaliknya. Rata-rata rasio profitabilitas untuk seluruh sampel disajikan dalam Tabel 4.1

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa dari kelima rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Empat rasio mengalami penurunan, yaitu rasio *gross profit margin*, *operating profit margin*, *net profit margin*, dan *return on assets*. Sedangkan yang mengalami peningkatan hanya satu rasio saja, yaitu rasio *return on equity*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan sesudah tidak lebih besar dari pada tingkat profitabilitas perusahaan sebelum pemenuhan *good corporate governance*.

Hasil ini juga sesuai dengan pengukuran *mean descriptive* yang dapat dilihat pada Tabel 4.2, yang menunjukkan bahwa dari keseluruhan rasio profitabilitas hanya satu rasio saja yang *mean*-nya mengalami peningkatan, yaitu ROE, sedangkan keempat rasio lainnya mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa secara rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan sesudah tidak lebih besar dari pada tingkat profitabilitas perusahaan sebelum pemenuhan *good corporate governance*.

Berdasarkan uji *paired sample test* yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 secara keseluruhan terlihat bahwa nilai t_{hitung} dan nilai signifikansi yang diperoleh mendukung hipotesis nul diterima atau hipotesis alternatif ditolak, yang membuktikan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan sesudah pemenuhan *good corporate governance* tidak lebih besar daripada tingkat profitabilitas perusahaan sebelum pemenuhan *good corporate governance*.

Dari analisis dan penguraian diatas terbukti bahwa perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pengangkatan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan yang sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor : KEP-399/BEJ/07-2001, tidak mengalami peningkatan yang ditinjau dari tingkat profitabilitas, bahkan secara rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut mengalami penurunan dibanding sebelum adanya pengangkatan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.

Hasil ini kontradiktif bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Claessens, Djankov, dan Pohl (1996); Patibandia (2001); Gompers, Ishii, dan Metrick (2003) menunjukkan bahwa dengan adanya *good corporate governance* kinerja perusahaan yang dilihat dari tingkat profitabilitas menjadi lebih baik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya : adanya penurunan unsur-unsur yang terdapat dalam rasio profitabilitas, adanya jenis sektor industri yang digunakan sebagai sampel, dan besar kecilnya ukuran perusahaan.

Dari hasil analisis deskriptif dapat dilihat bahwa terdapat penurunan rasio-rasio profitabilitas, yaitu *gross profit margin*, *operating profit margin*, *net profit margin*, dan *return on asset*., dimana unsur-unsur tersebut terdiri dari *sales*, *cost of goods sold*, *operating profit*, *net profit after taxes*, dan *total assets*. Tabel 4.4 adalah hasil rangkuman rasio profitabilitas sebelum dan sesudah pemenuhan *Good Corporate Governance*. Dari Tabel 4.4 dapat kita lihat bahwa untuk unsur *gross profit margin* (GPM) mengalami peningkatan sesudah pemenuhan *good corporate governance* dari sisi *sales* sebesar 49,4% maupun *cost of goods sold* yang sebesar 56,9%. Akan tetapi peningkatan *cost of goods sold* yang lebih tinggi dari *sales* ini menyebabkan adanya penurunan GPM sesudah pemenuhan *good corporate governance*.

Pada *operating profit margin* (OPM) dan *net profit margin* (NPM), juga menunjukkan hal yang sama yaitu terdapat peningkatan unsur OPM dan NPM sesudah pemenuhan *good corporate governance*. Untuk OPM *operating profit* meningkat sebesar 7,5% dan *net profit after taxes* pada NPM sebesar 38,1%. Akan tetapi peningkatan *operating profit* dan *net profit after taxes* tidak berimbang dengan peningkatan *sales* sehingga menyebabkan OPM dan NPM sesudah pemenuhan *good corporate governance* mengalami penurunan.

Untuk *return on assets* juga mengalami peningkatan unsur-unsurnya yaitu *total assets* sebesar 4,3% dan *sales* sebesar 49,4%. Namun peningkatan kedua unsur tersebut tidak berimbang sehingga menyebabkan adanya penurunan ROA sesudah pemenuhan *good corporate governance*.

Sedangkan pada *return on equity* (ROE), unsur-unsurnya juga mengalami peningkatan sesudah pemenuhan *good corporate governance*, yaitu *stockholders equity* sebesar 60,8% dan *net profit after taxes* sebesar 38,1%. Peningkatan *stockholders equity* yang diimbangi dengan peningkatan *net profit after taxes* inilah yang menyebabkan ROE mengalami peningkatan sesudah pemenuhan *good corporate governance* dibanding rasio profitabilitas lainnya..

Ketigabelas perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini sektor industri yang paling banyak adalah perusahaan sektor industri tekstil. Dari analisis deskriptif terlihat bahwa kebanyakan perusahaan yang nilai rasionya menurun adalah dari sektor industri tekstil.. Berikut adalah daftar lima terendah perusahaan yang memiliki rasio terendah yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dari tabel diatas terlihat bahwa perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas rendah didominasi oleh perusahaan tekstil. Sedangkan yang kita ketahui bahwa perusahaan tekstil setelah krisis moneter mengalami penurunan penjualan, sehingga dengan demikian penurunan perusahaan tekstil ini berpengaruh pada penurunan profitabilitas pada penelitian ini.

Sedangkan dari besar kecilnya ukuran perusahaan yang dapat kita lihat pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang termasuk dalam penelitian ini adalah berskala kecil, total dari tigabelas perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebelas diantaranya berukuran kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam penurunan profitabilitas di penelitian ini.

5. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

1.1 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: kesempurnaan. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kriteria pemenuhan *good corporate governance* pada penelitian ini terbatas pada pemenuhan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan sesuai dengan Kep-399/BEJ/07-2001 Peraturan IA Huruf C.1.
2. Pada penelitian ini tidak mengukur sejauh mana peranan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan dalam penerapan *good corporate governance*.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini minimal dapat mendorong dan memicu dilakukan penelitian-penelitian berikutnya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian yang akan datang mempertimbangkan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yang tertarik dengan topik ini dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat penerapan GCG dilihat dari sudut pandang ukuran perusahaan. Selain itu dapat pula dikembangkan melakukan perhitungan profitabilitas berdasarkan satu tahun sesudah pemenuhan GCG, dua tahun sesudah pemenuhan GCG, tiga tahun sesudah pemenuhan GCG, dan seterusnya.
2. Dalam penelitian selanjutnya juga diharapkan adanya pengembangan kriteria pemenuhan GCG, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Kep-399/BEJ/07-2001, tetapi juga dilihat berdasarkan kriteria-kriteria penerapan GCG lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah A Fajari. 2004. Trend Global Good Corporate Governance, (<http://www.nuonline.com>, diakses 31 Maret 2004).
- Agus Subardi. 1994. *Manajemen keuangan*. Edisi pertama. Cetakan Pertama, Yogyakarta: AMP YKPN
- Ari Muji Karsitaningsih dan Irawan. 1999. "Analisis Kinerja keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah *Go Public* Pada Industri Otomotif" Penelitian STIE Perbanas Surabaya.
- Bursa Efek Jakarta. 2003. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, (<http://www.jsx.co.id>, diakses 19 Maret 2004).
- Claessens, Stijn; Djankov, Simeon; dan Pohl, Gerhard. 1996. " *Ownership and Corporate Governance:Evidence from The Czech Republic*". Makalah ini disampaikan pada *International Beijing Symposium on Capital Markets Enterprise Reform in Beijing*.
- Dewanto dan Tarsis Tarmudji. 1995. " *Metode Statistika*". Liberty: Yogyakarta.
- Drucker, Peter F. 1998. *Pengantar Manajemen*. Alih Bahasa Ny. Rochmulyati Hamzah dan dikoreksi oleh Staff Lembaga PPM . Harper and Row Publisher Inc: Newyork.
- Dwi Prastowo. 1995. *Analisa Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasinya*. Edisi pertama. Cetaka Pertama. Yogyakarta : AMP YKPN
- Gompers, Paul A; Ishii, Joy L; dan Metrick, Andrew. 2003. " *Corporate Governance and Equity Prices*". *Quarterly Journal of Economic* 118(1) February:107-155
- Helfert, Eric A. 1996. Teknik Analisis keuangan : Petunjuk Praktis Untuk Mengelola dan mengukur Kinerja Perusahaan. Edisis kedelapan Jakarta.
- Lukman, Syamsudin M. 1995. *Manajemen keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasinya dalam : Perencanaan dan Pengambilan Keputusan)*". Yayasan Pusat Pengkajian Latihan dan Pengembangan masyarakat (YP2LPM); Malang

- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim. 200. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta Patibandia, Murali. 2001. *Equity Pattern, Corporate Governance and Performance : A Study of India's Corporate Sector" First Draft: Oktober 2001.*
- Nurmala Ahmar dan Diyah Pujiati, 2003. " Analisis Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Memperoleh Sertifikasi ISO SERI 9000: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta". *Ventura*, Vol. 6, No.3, desember 2003, hal 271-286.
- "Pedoman Pengelolaan Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, hal 75-83
- S Munawir. 1992. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Liberty
- Surifah, 2002. "Studi Tentang Rasio keuangan Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan Perusahaan Publik di Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi". *Kajian Bisnis STIE Widya Wihawa Yogyakarta*, 27 September-Desember 2002, hal 25-43
- Syafarudin Alwi. 1991. *Alat-Alat Analisis dalam Pembelanjaan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Tanjung Pertiwi. 2004. *Analisis Potensi Kebangkrutan Perusahaan dan Pemenuhan Corporate Governance dengan Pendekatan Model Altman*". Skripsi sarjana tidak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya

Lampiran :

Tabel 4.1

Rata-Rata Rasio Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Pemenuhan *Good Corporate Governance*

Uraian	Sebelum	Sesudah	↑↓
<i>Gross Profit Margin</i>	0.243	0.140	-0.102
<i>Operating Profit Margin</i>	0.106	-0.046	-0.152
<i>Net Profit Marin</i>	0.008	-0.115	-0.123
<i>Return On Equity</i>	0.084	0.134	0.049
<i>Return On Assets</i>	0.041	-0.059	-0.100

Tabel 4.2

Hasil Perhitungan Uji *One-Sample Kalmogorov Smirnov*

Uraian	N	Mean	Std. Deviation	Signifikansi
GPM_SBM	13	0.24254	0.13982	0.879
OPM_SBM	13	0.10577	0.10312	0.874
NPM_SBM	13	0.008	0.16956	0.471
ROE_SBM	13	-0.1185	1.19222	0.172
ROA_SBM	13	0.04062	0.10617	0.780
GPM_SSD	13	0.14031	0.30166	0.421
OPM_SSD	13	-0.0458	0.34103	0.082
NPM_SSD	13	-0.1168	0.39498	0.281
ROE_SSD	13	0.1233	0.32211	0.909
ROA_SSD	13	-0.0413	0.25869	0.543

Keterangan :

- GPM_SBM : rata-rata *gross profit margin* sebelum pemenuhan *good corporate governance*.
 OPM_SBM : rata-rata *operating profit margin* sebelum pemenuhan *good corporate governance*.
 NPM_SBM : rata-rata *net profit margin* sebelum pemenuhan *good corporate governance*.
 ROE_SBM : rata-rata *return on equity* sebelum pemenuhan *good corporate governance*.
 ROA_SSD : rata-rata *return on asset* sebelum pemenuhan *good corporate governance*.
 GPM_SSD : rata-rata *gross profit margin* sesudah pemenuhan *good corporate governance*.
 OPM_SSD : rata-rata *operating profit margin* sesudah pemenuhan *good corporate governance*.
 NPM_SSD : rata-rata *net profit margin* sesudah pemenuhan *good corporate governance*.
 ROE_SSD : rata-rata *return on equity* sesudah pemenuhan *good corporate governance*.
 ROA_SSD : rata-rata *return on asset* sesudah pemenuhan *good corporate governance*.

Tabel 6.3
Uji Paired Sample t-Test

Uraian	t _{tabel}	t _{hitung}	Signifikansi	Hipotesis Nul
Gross profit margin	1.782	1.561	0.145	diterima
Operating profit margin	1.782	1.728	0.110	diterima
Net profit margin	1.782	1.147	0.274	diterima
Return on equity	1.782	-0.741	0.473	diterima
Return on assets	1.782	1.241	0.238	diterima

Tabel 4.4
Rata-Rata Unsur Rasio Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Pemenuhan *Good Corporate Governance*

No	Uraian	Sbm	Ssd	↑↓	%
1	Sales	1242161	1855273	613112	49.4
2	Cost of Good Sold	874478	1372142	497664	56.9
3	Operating Profit	239976	257945	17969	7.5
4	Net Profit After Taxes	102134	141024	38891	38.1
5	Stockholders Equity	391970	630121	238151	60.8
6	Total Assets	1226719	1279564	52846	4.3

Keterangan :

Sbm : Rata-rata sebelum pemenuhan *good corporate governance*

Ssd : Rata-rata sesudah pemenuhan *good corporate governance*

↑↓ : Kenaikan dan penurunan rasio

% : $\left\{ \frac{Ssd - Sbm}{Sbm} \right\} \times 100\%$

Tabel 4.5
Daftar Lima Terendah Perusahaan dari Sampel yang Memiliki Rasio Profitabilitas Terendah

No	Rasio	Perusahaan Tekstil	Perusahaan Lainnya
1	<i>Gross Profit Margin</i>	3	2
2	<i>Operating profit Margin</i>	3	2
3	<i>Net Profit Margin</i>	3	2
4	<i>Return On Equity</i>	0	5
5	<i>Return On Assets</i>	3	2

Tabel 4.6
Pembagian Perusahaan Berdasarkan Besar Kecilnya *Total Assets*

Ukuran Perusahaan	Jumlah	%
Besar	1	7%
Menengah	1	7%
Kecil	12	86%
Total	13	100%